

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Lembaga Percetakan, 2002.
- , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yasrif Watampone, Ujung Pandang, 1998.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Barda Nawawi Arief dalam Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group 2007.
- Colonel Wahyu Wibowo, "Pengkajian hukum tentang penggunaan senjata api dan bahan peledak untuk kepentingan militer dan sipil", Laporan Akhir, Pengayoman Kementrian Hukum dan Ham, 2011.
- Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, 2008.
- Laica Marzuki, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, (Jakarta: Kontitusi Press, 2005).

- Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspektif*, Russel Sage Foundation, New York. Hal. 16. Dalam Musakkir. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. 2014. Jakarta: Komisi Yudisial.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, Rajawali Pers, 1994.
- Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ranoemihardja, *Asas-asas pokok pengertian Teori Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Reko Gustiono, *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Illegal Menurut Undang-Undang Darurat dan Hukum Islam*, Jambi: UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997.
- Rusli Efendi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Lembaga Percetakan, 1985.
- Sahran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 2005.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.

Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983.

Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1979.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*
Bandung: Refika Aditama, 1989.

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Sumber Lain

Anak Agung Ngurah Bayu Ariadi, dkk, Pertanggungjawaban Pidana atas Penyalahgunaan Senjata Api, lihat <https://dilmil-kupang.go.id/web/upload/jurnalhukum/Pertanggungjawaban%20Penyalahgunaan%20Senpi.pdf>

Andi Widjayanto, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.

Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>

Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, *Majalah Media Hukum* Vol. 1 No. 3 tanggal 22 Agustus 2003.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Rayhana S., Pembatasan Kepemilikan Senjata Api oleh Masyarakat Sipil dalam Perspektif Hukum dan Sanksi Pidana atas Penyalahgunaannya, lihat <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>

Aturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ordonansi Senjata Api 1937 (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 278)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 1998

Surat Direktur Intelpam Nomor R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP tertanggal 24 Juli 1998

Surat Direktur Intelpam Nomor: B/337/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988

SK Kapolri Nomor Skep/244/II/1999 dan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri

Keputusan Presiden No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Menteri Pertahanan RI No. 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak

Peraturan Kepala Kepolisian RI No 8 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengawasan Bahan Peledak Komersial

